

Peranan Lembaga Perkreditan Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bali

Ni Nyoman Murniasih
Prodi Pendidikan Ekonomi FPIPS IKIP PGRI Bali
murniasihikip@gmail.com

Perkembangan ekonomi di negara berkembang pada saat ini memiliki peranan yang sangat penting guna menunjang perkembangan di berbagai sektor lainnya. Sektor keuangan saat ini masih menjadi penopang perekonomian yang ada di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya diperlukan perkembangan ekonomi di berbagai kalangan, termasuk dalam tingkatan masyarakat desa. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa adat/desa pakraman yang ada di Provinsi Bali. LPD merupakan salah satu contoh lembaga keuangan yang mengutamakan kearifan lokal dan budaya dalam mengembangkan usahanya. LPD sudah terbukti dan mampu untuk turut menjadi bagian dalam perkembangan masyarakat desa. Perkembangan LPD dari tahun ke tahun terkait dengan perkembangan jumlah LPD di sembilan Kabupaten/Kota di Bali, perkembangan aset serta laba yang dihasilkan oleh LPD. Perkembangan tersebut nantinya akan memberikan pengaruh pada peningkatan perekonomian masyarakat Bali dalam berbagai bidang.

Kata kunci: Lembaga Perkreditan Desa, Peningkatan Ekonomi

PENDAHULUAN

Negara berkembang termasuk Indonesia, dalam sepuluh tahun terakhir dihadapkan pada berbagai masalah yang sulit dalam mencapai tujuan pembangunan ekonominya, pertumbuhan penduduk yang tinggi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Negara-negara yang sedang berkembang (*developing countries*) masalah-masalah perencanaan pembangunan umumnya dan perencanaan pembangunan desa khususnya semakin terasa manfaatnya dan memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan nasional. Pembangunan yang diharapkan tiada lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu. Perubahan-perubahan yang direncanakan dengan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya. Proses pembangunan bisa berhasil dengan maksimal ketika adanya usaha mengubah sikap mental masyarakat/ khususnya petani di desa-desa diarahkan dan disesuaikan untuk menerima ide-ide

baru terutama yang menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat di desa. Pembangunan masyarakat adalah suatu proses yang multi dimensional yang struktural, perubahan struktur meliputi semua segi aspek kemasyarakatan, tetapi pada permulaan yang diperlukan terutama pengembangan ekonomi.

Indonesia dengan keseluruhan provinsinya, termasuk Bali dalam 32 tahun dari tahun 1965 sampai tahun 1997, telah mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata tujuh persen pertahun, namun tujuan yang lainnya pemerataan distribusi pendapatan baik antar golongan penduduk maupun antar daerah belum menunjukkan hasil yang diinginkan masih timpang. Menyadari adanya kelemahan yang mewarnai pendekatan pembangunan yang menekan pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini munculah berbagai konsep pembangunan alternative, seperti *ecodevelopment* dan *sustainable development*. Pendekatan pembangunan ekologi *ecodevelopment* memandang keberlanjutan pembangunan dari

sudut sejarah kebudayaan masyarakat tertentu, keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat biasa, *ethno-ecologi*, dan keadaan alam yang mewarnai ekosistem setempat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tinggal dalam lingkungan tersebut. Konsep pembangunan yang diperlukan yang mendekati pembangunan dari sudut budaya masyarakat dan ekologi serta lingkungan fisik, mengaris bawahi pentingnya kearifan lokal dan ekonomi *indiginus* (budaya) sebagai acuan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan yang tetap memandang perlunya pertumbuhan ekonomi, namun yang diacu adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang sesuai dengan lingkungan. Pembangunan ekonomi hendaknya memperhitungkan nilai budaya masyarakat serta dapat melestarikan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat. Di Provinsi Bali terdapat suatu lembaga keuangan yang terdapat di masing-masing desa adat/desa pakraman yang dikenal dengan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengutamakan kearifan

lokal. LPD merupakan lembaga keuangan milik desa pakraman yang telah dikembangkan, memberikan manfaat sosial, ekonomi dan budaya kepada anggotanya, sehingga perlu dibina, ditingkatkan kinerjanya, diperkuat dan dilestarikan keberadaannya (Suartana, 2009:12).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian terkait Peranan LPD dalam meningkatkan perkeekonomian masyarakat Bali yang ditinjau dalam segi jumlah LPD, aktiva dan laba LPD pada Tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ilmiah rancangan penelitian pada dasarnya merupakan suatu kegiatan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan merencanakan itu mencakup komponen-komponen penelitian yang diperlukan. Rancangan penelitian diartikan sebagai usaha merencanakan dan menentukan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam suatu penelitian (Moeleong, 1991:236). Penelitian tentang Peranan LPD dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bali

merupakan penelitian kualitatif. Timbulnya metode kualitatif dipicu oleh pemahaman bahwa gejala kehidupan terdiri atas dua unsur yang berbeda, yaitu unsur yang terindra dan tak terindra. Bahkan, manusia itu sendiri terbentuk atas dasar kedua gejala tersebut (Kutha Ratna, 2010 : 90). Penelitian ini dilakukan se-provinsi Bali Pemilihan Lokasi karena Bali merupakan salah satu pulau yang banyak berkembangnya Kerajinan tangan dan penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian yang sudah tentu banyak memerlukan dana untuk modal usaha dan pengembangan pertanian dan adanya fenomena bahwa perkembangan Lembaga Perkreditan Desa sangat pesat di Bali. Jenis data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif sebagai penunjang yang sifatnya melengkapi. Data kualitatif diperoleh dari beragam informasi informan maupun kegiatan observasi yang dilakukan. Sedangkan data kuantitatif adalah dalam bentuk catatan statistik yang ditemukan di lokasi penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini juga ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari pelaku masyarakat yang terlibat secara langsung dalam lembaga perkreditan desa. Data sekunder didapat dari artikel, buku-buku atau literatur, internet dokumen dan tulisan lainnya yang menunjang penelitian ini. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari data yang tersimpan di kantor desa. Instrumen penelitian yang paling utama adalah berupa pedoman wawancara menyangkut beberapa pertanyaan yang telah dirumuskan dengan baik, menyangkut tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini menekankan pada dua jenis teknik pengumpulan data, yakni (1) pengamatan terlibat (*participant observation*), dan (2) wawancara mendalam (*indepth interview*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan interpretatif. Analisis dilakukan sejak peneliti terjun ke

lapangan untuk mengumpulkan data. Deskriptif mengacu pada transformasi dari data-data mentah ke dalam bentuk yang mudah dimengerti dan diterjemahkan (Wibisono, 2003: 134). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan secara informal (naratif) dengan bahasa ragam ilmiah, narasi, deskripsi kata-kata dan formal berupa bagan, tabel, bentuk gambar hasil perhitungan statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum

Terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa diawali dengan diadakannya

seminar mengenai kredit pedesaan yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 1984. Seminar tersebut memberikan inspirasi bagi beberapa daerah untuk memulai melakukan pergerakan dengan cara mendirikan lembaga keuangan yang berbasis desa, seperti yang dilakukan di Provinsi Bali dengan mendirikan LPD. Perkembangan LPD di Bali sudah berjalan dari beberapa tahun belakangan ini, seperti terlihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1 Perkembangan LPD 1999- Juni 2013

Indikator	1999	2005	2011	Juni 2013
Jumlah LPD (dalam unit)	912	1.304	1.416	1.418
Aset total (triliun Rp.)	0,377	1,743	6,584	9,477
Portopolio pinjaman total (triliyun Rp.)	0,216	1,262	4,791	7,034
Simpanan total (triliyun Rp.)	0,256	1,346	5,500	7,972
Jumlah Karyawan			7.367	7.511

Sumber: Suartana, 2013

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat LPD di Bali senantiasa bertumbuh, baik dari segi jumlah fisik LPD, aset, portopolio pinjaman, simpanan

masyarakat bahkan jumlah karyawan LPD. Pada tahun 2016, pertumbuhan jumlah LPD beserta aktiva dan laba dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini

Tabel 2. Jumlah LPD di Provinsi Bali beserta Aktiva dan Laba tahun2016

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah LPD	Jumlah aktiva (dalam 000 Rupiah)	Jumlah laba (dalam 000 Rupiah)
1	Jembrana	64	480.650.310	19.660.173
2	Tabanan	307	1.282.018.120	45.655.882
3	Badung	122	4.192.183.809	136.001.473
4	Gianyar	270	3.283.895.397	102.860.546
5	Klungkung	117	626.209.665	30.666.022
6	Bangli	159	749.232.892	33.822.294
7	Karangasem	190	1.042.893.544	35.128.814
8	Buleleng	169	1.772.883.196	65.030.828
9	Denpasar	35	1.625.610.986	70.217.525
	Total	1.433	15.055.577.919	539.043.557

Sumber : LPLPD Provinsi Bali

Lembaga perkreditan desa merupakan salah satu unsur kelembagaan desa yang menjalankan fungsi keuangan desa *pakraman* untuk mengelola potensi keuangan desa. LPD sangat berpotensi dan telah terbukti mampu memajukan kesejahteraan masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan desa tersebut. Berdasarkan laporan

dari Lembaga Pemberdayaan LPD Tahun 2016, jumlah LPD yang ada di Provinsi Bali sebanyak 1.433 LPD yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota. Pada tabel 2 berikut ini akan disajikan prosentase laba LPD untuk memberikan gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan LPD.

Tabel 3. Laba yang diperoleh masing-masing Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2016.

No	Kapupaten/Kota	Prosentase Laba
1	Jembrana	4,09 %
2	Tabanan	3,56 %
3	Badung	3,24 %
4	Gianyar	3,13 %
5	Klungkung	4,90 %
6	Bangli	4,51 %

7	Karangasem	3,37 %
8	Buleleng	3,67 %
9	Denpasar	4,32 %
Total		34,79 %
Rata-rata		3,865 %

Berdasarkan Tabel di atas LPD Kabupaten Klungkung memperoleh prosentase Laba tertinggi yakni sebesar 4,90 % , yang terendah adalah LPD Kabupaten Gianyar yakni sebesar 3,13 %. Berdasarkan data-data yang ada semua LPD menunjukkan adanya pencapaian Laba tidak ada LPD yang rugi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan LPD sangat diperlukan bagi desa pakraman karena mampu mengembangkan kehidupan ekonomi, sosial maupun budaya masyarakat.

2. Peranan LPD dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Bali

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa jumlah LPD mengalami peningkatan sebanyak 15 LPD yakni tahun 2013 sebanyak 1.418 dan tahun 2016 menjadi 1.433 LPD ini membuktikan bahwa animo masyarakat Bali untuk mendirikan LPD terus meningkat. Peningkatan ini tidak terlepas dari manfaat yang diberikan oleh LPD kepada masyarakat terutama desa pakraman. Sebab dengan adanya LPD memberikan kemudahan bagi

masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana yang sangat diperlukan dalam pengembangan aktivitas yang dilakukan di desa pakraman. Karena selama ini banyak kegiatan –kegiatan yang bisa dilakukan tetapi terbentur masalah pendanaan dengan hadirnya LPD peluang untuk meningkatkan usaha yang ada di desa pakraman menjadi lebih besar. Dari peningkatan aset yang dimiliki oleh LPD menunjukkan perkembangan yang sangat besar. Jika aset yang dimiliki bertambah besar maka orang/ karyawan yang diperlukan dalam pengelolaan LPD juga akan bertambah ini akan memberikan peluang yang sangat besar dalam membuka kesempatan kerja yang ada di desa pakraman. Berdasarkan laba yang diperoleh LPD di masing-masing Kabupaten, Kabupaten Badung memperoleh laba yang paling tinggi yakni 136.001.473 (dalam ribuan rupiah) dengan aset yang dimiliki sebesar 4.192.183.809 (dalam ribuan rupiah) padahal dilihat dari jumlah LPD yang ada di Kabupaten Badung hanya 122 LPD.

Berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 4 Tahun 2012, 20 % keuntungan bersih LPD akan digunakan sebagai dana pembangunan desa. Hal ini berarti keberadaan LPD sangat penting bagi desa pakraman untuk pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pengembangan ekonomi LPD memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat pedesaan terutama dalam pemenuhan permodalan usaha yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan usaha /aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat karena LPD menyediakan kredit yang diperuntukan bagi masyarakat di desa pakraman. Dalam bidang sosial LPD mengemban misi sosial dalam masyarakat/ desa pakraman, bidang sosial ini perlu diterapkan karena manusia adalah makhluk sosial dimana antara yang satu dengan yang lainnya memiliki ikatan dan manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Demikian pula halnya dengan LPD akan lebih sukses lagi kalau didalam pelaksanaannya tidak

semata-mata di dorong oleh motif ekonomi/keuntungan saja. Dalam pengembangan budaya LPD memang cocok diterapkan di Bali karena budaya yang dimiliki oleh Bali mempunyai ciri khas tersendiri terutama sistem gotong royong yang sampai saat ini masih banyak dilestarikan melalui banjar adat yang ada di Bali. Jadi kehadiran LPD di Bali memang cocok dengan budaya yang dianut di Bali.

LPD hadir mengemban visi dan misi untuk menjaga budaya Bali yang menjadi andalan dan keunikan Bali dalam pergaulan internasional. Sebagai salah satu pola perkreditan masyarakat yang bersifat unik dan spesifik dan hanya ada di Bali. Sejak berdirinya LPD pertama di Bali, masyarakat Bali sudah memperoleh banyak manfaat dari keberadaannya di masing-masing desa pakraman di Bali.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa LPD adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa Adat. LPD telah terintegrasi dalam kehidupan dan hukum adat

dan telah menjadi kerangka yang sangat kuat dalam mengemban hubungan pelanggan dan mengelola resiko. Jumlah LPD yang ada di Bali dari tahun ketahun terus bertambah dalam hal ini tahun 1999. Sebanyak 912 LPD, tahun 2005 sebanyak 1304 LPD , tahun 2011 sebanyak 1.416 LPD, tahun 2013 sebanyak 1.418 LPD dan tahun 2016 sebanyak 1.433 LPD. Ini menunjukkan bahwa animo desa adat untuk mendirikan LPD terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari jumlah aktiva yang dimiliki LPD juga menunjukan peningkatan tahun 2013 besarnya aktiva/asset yakni sebesar Rp 9.477.117.141.000, sedangkan tahun 2016 sebanyak Rp 15.055.577.919.000. Peningkatan asset sebesar 5.578.460.778.000. Jika diprosentasekan sebesar 58,86 % (selama 3 tahun), jadi setahun meningkat sebesar 19,62%. Dari Laba yang didapat LPD 20 % diperuntukan untuk desa ,ini benar-benar akan bermanfaat bagi pembangunan masyarakat desa yang nantinya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Bali ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Bali.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Badung. Badung dalam Angka 2016. Diakses pada tanggal 31 Januari 2017. <https://www.scribd.com/document/328214767/kabupaten-badung-dalam-angka-2016>.
- Handoko, T.Hani. 2011. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Kasmir, 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta ; PT RajaGrafindo Persada.
- Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lia Amalia, 2007. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa. 2016. *Neraca LPD Tahun 2014-2016*.
- Nurjaya, I Nyoman. 2011. Lembaga Perkreditan Desa di Bali dalam Perspektif Antropologi Hukum. Dalam *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*, disunting oleh Putra, Wyasa Ida Bagus, hal 23-34. Denpasar: Udayana University Press.
- Pancadana, Dewa Made dan AA Gde Oka Parwata. 2013. Catur Purusa Artha sebagai Dasar Kegiatan Usaha LPD di Desa Pakraman Kikian. *Jurnal*

- Kertha Semaya*, vol. 01, No.02 Februari.
- Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali No. 11 Tahun 2013 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa*.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2013. *Research Method for Business (Sixth Edition)*. United Kingdom: Wiley & Sons Ltd.
- Setyawan, Komang Meitradi dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3 (hal 586-598).
- Suartana, I Wayan.2009. *Arsitektur Pengelolaan Risiko pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Suartana, I Wayan. 2013. *Risk Based Audit Berbasis Budaya pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) menuju Inklusi Keuangan Berkelanjutan*. Denpasar: Badan Penjamin Mutu Unud 2013.
- Sujana, I Ketut, A.A.N.B Dwirandra, I.G.A.M Asri Dwija Putri, I Made Sadha Suardikha. 2015. Akuntabilitas dalam perspektif budaya lokal pada Lembaga Perkreditan Desa. Laporan Penelitian Unggulan Universitas Udayana.
- Sonya, I Ketut.2016. *Praktek Tata Kelola Dalam Perspektif Nilai Budaya Lokal Pada Lembaga Perkreditan Desa* .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.Presiden Republik Indonesia.8 Januari 2013.
- Wardana, I Dewa Putu Eka Wijaya. 2011. Perkembangan Pengaturan LPD sebagai Lembaga Keuangan Komunitas pada Komunitas Desa Pakraman. Dalam *Landasan Teoritik Pengaturan LPD*,disunting oleh Putra, Wyasa Ida Bagus, hal 89-108. Denpasar: Udayana University Press.